

Paman Birin dan Acil Odah Serahkan Bantuan Rehabilitasi RTLH dan Dampak Banjir



Sumber gambar:

<https://dutatv.com/paman-birin-dan-acil-odah-serahkan-bantuan-rehabilitasi-rtlh-dan-dampak-banjir/>

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah, secara simbolis menyerahkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dampak bencana dan kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan, di Desa Pematang Panjang Kabupaten Banjar. Untuk tahun 2024, pemerintah Provinsi Kalsel memberikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh sebanyak 865 unit yang tersebar di 13 kabupaten kota.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan, pemerintah sudah melakukan rehabilitasi secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir untuk rumah masyarakat yang menjadi korban bencana banjir besar pada tahun 2021 lalu.

Tahun depan menurut Mursyidah Amini, rehabilitasi rumah di kawasan kumuh provinsi Kalsel, ditargetkan sebanyak 240 unit dan rehabilitasi rumah rusak korban bencana sebanyak 1.000 unit.

Jumri Abi, salah satu penerima bantuan rehabilitasi RTLH korban bencana di kabupaten Banjar, mengaku sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalsel atas bantuan yang diberikan.

Warga Jalan Trans Ambubun Jaya RT 2 Jalur 6, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar ini mengaku sangat terharu, dan tidak menyangka akan mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi Kalsel. Apalagi dengan kondisi menganggur selama 7 tahun terakhir, pasca menjalani operasi, Jumri harus tinggal di bangunan rumah yang menurutnya tidak layak disebut sebagai rumah.

Diketahui bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni korban bencana dan kawasan kumuh ini berupa dana 20 juta rupiah. Dengan rincian, 17,5 juta rupiah untuk biaya pembelian material dan 2,5 juta rupiah untuk biaya tukang.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/paman-birin-dan-acil-odah-serahkan-bantuan-rehabilitasi-rtlh-dan-dampak-banjir/>, *Paman Birin dan Acil Odah Serahkan Bantuan Rehabilitasi RTLH dan Dampak Banjir*, (15/11/2024)
2. <https://abdipersadafm.co.id/2024/05/31/didampingi-acil-odah-paman-birin-serahkan-bantuan-sosial-rehabilitasi-rtlh-tahun-2024/>, *Didampingi Acil Odah, Paman Birin Serahkan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH Tahun 2024*, (15/11/2024)

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat dibelikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

6. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
8. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
9. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
10. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
11. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
12. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
13. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
14. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
15. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
16. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak

harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.